

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
FIS UNP Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh:
YOLANDA HENDRI
NIM 1205846/2012

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2017**

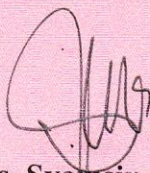
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima
Nama : Yolanda Hendri
TM/ NIM : 2012/ 1205846
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2017

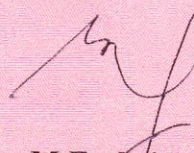
Disetujui oleh:

Pembimbing I,



Drs. Syamsir, M.Si., Ph.D
NIP. 19630401 198903 1 003

Pembimbing II,



Drs. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa 7 Februari 2017 pukul 13.00 s/d 15.00 WIB

Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

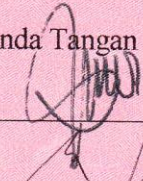
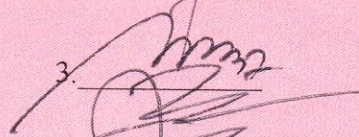
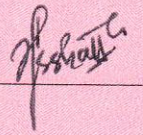
Nama : YOLANDA HENDRI
TM/ NIM : 2012/ 1205846
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 7 Februari 2017

Tim Penguji:

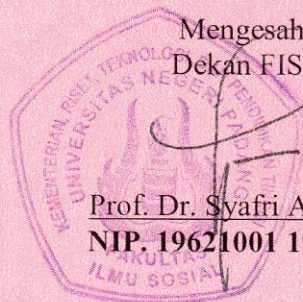
	Nama
Ketua	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D
Sekretaris	: Drs. M.Fachri Adnan, M.Si. Ph.D
Anggota	: Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D
Anggota	: Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D
Anggota	: Siska Sasmita, S.IP, MPA

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002



SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOLANDA HENDRI

TM/ NIM : 2012/ 1205846

Tempat/ Tanggal Lahir : Sungai Penuh/ 6 Agustus 1994

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima”** adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang, 7 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



YOLANDA HENDRI
TM/ NIM: 2012/ 1205846

BIODATA PENULIS



Yolanda Hendri atau yang sering akrab dipanggil Ola atau Anda lahir di Kota Sungai Penuh pada tanggal 6 Agustus 1994, anak dari Bapak Hendri dan Ibu Dismurni. Alamat tinggal Jln. Patenggangan Blok B No 7 Airtawar. Pendidikan yang pernah ditempuh penulis yakni dimulai dari SD 145/III Lawang Agung, SMP Negeri 2 Kota Sungai Penuh, SMA Negeri 2 Kota Sungai Penuh, dan terakhir penulis menamatkan pendidikan jenjang Strata 1 (S1) di Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, periode 108 Maret 2017 dengan IPK 3,21 dalam waktu studi 4,5 tahun dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima” dengan Dosen Pembimbing I Bapak Drs. Syamsir M.Si., Ph.D dan Dosen Pembimbing II Bapak Drs. M.Fachri Adnan M.Si., Ph.D Dosen Penguji I Bapak Aldri Frinaldi S.H, M.Hum, Ph.D, Dosen Penguji II Afriva Khaidir, MAPA, Ph.D, Dosen Penguji III Ibuk Siska Sasmita S.IP, MPA

Telepon : 081279760666

E-mail : yolandahendri6894@gmail.com

ABSTRAK

Yolanda Hendri 1205846/2012 : Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan Pedagang Kaki Lima (PKL) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kurang teraturnya Pedagang Kaki Lima (PKL) di jalan Kota sebagai faktor yang menyebabkan jalan kota semakin sempit. Oleh sebab itu, pelaksanaan peraturan daerah ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal sehingga tujuan untuk menciptakan kawasan yang tertib, bersih dan aman bisa terlaksana dengan baik dan implikasinya bisa dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian ini membuat deskripsi dan gambaran tentang suatu keadaan sebenarnya. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling*.. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara. Teknik menguji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber pada data kualitatif. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada kualitatif adalah reduksi data, interpretasi data, pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan pedagang kaki lima yang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana secara maksimal, dan masih kurangnya kesadaran dari para pedagang kaki lima terhadap aturan yang berlaku. Hambatan dari penataan pedagang kaki lima ini antara lain disebabkan adanya pedagang yang tidak mengindahkan aturan dari Kantor Pasar untuk berpindah tempat jualan, sehingga mengakibatkan adanya penumpukan pedagang yang membuat jalan kota semakin sempit. Upaya yang dilakukan adalah sosialisasi yang rutin dilakukan setiap tahun kepada pedagang kaki lima (PKL) dan sekaligus mengajak para pedagang kaki lima bekerjasama mensukseskan peraturan daerah. Dengan kata lain pelaksanaan peraturan daerah ini bisa dikatakan belum berjalan dengan baik dan maksimal karena dalam proses pelaksanaannya masih terdapat kekurangan sehingga perlu perbaikan bertahap sehingga hasil yang dicapai bisa lebih maksimal.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Pedagang Kaki Lima

KATA PENGANTAR



Assalammu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki”**. Skripsi ini dibuat demi memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Skripsi ini bukanlah akhir dari belajar karena belajar adalah sesuatu yang tidak terbatas.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak selama menyelesaikan skripsi ini, skripsi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penguji ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku dosen pembimbing I.
2. Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D selaku dosen Pembimbing II.
3. Bapak Apriva Khaidir, SH, M.Hum, MAPA, Ph.D, Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D, Ibuk Siska Sasmita, S.IP, MPA selaku Tim Penguji.
4. Bapak Adil Mubarak S.IP. M.Si selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan bimbingan, arahan, bantuan, dan motivasi dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan perkuliahan

5. Bapak dan Ibu dosen pengajar beserta staff Jurusan Ilmu Administrasi Negara.
6. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda serta keluarga besar yang telah memberikan doa dan dukungannya.
7. Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang BP 2012 serta senior – senior Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang .
8. Rekan - rekan “tercinta” yaitu Wahyuni Rivera, Khairunnisa, Zio Saldano Putra, Agung Sumitro, Widia Saputri, Rany Angelisa, Leory Bastian, dan Adryan Nofri yang selalu memberi semangat, motivasi, dan selalu membantu penulis dalam melaksanakan penelitian.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, selain itu saran, kritikan dan perbaikan senantiasa diharapkan untuk kesempurnaan yang akan datang. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Wasaalammu’alaikum Wr.Wb.

Padang, Januari 2017

YOLANDA HENDRI
NIM: 2012/1205846
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teoritis	8
1. Konsep Pelaksanaan	8
2. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2.....	13
3. Masalah pada Pedagang Kaki Lima.....	18
4. Faktor Penghambat Penataan Pedagang Kaki Lima	24
B. Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	29
D. Jenis Sumber Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	30
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum	36
B. Temuan Khusus	45
C. Pembahasan	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 82

B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 85

LAMPIRAN 88

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	30
-----------	--------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	44
Gambar 4.2 PKL Penjual Sembako.....	49
Gambar 4.3 PKL Penjual Minuman	50
Gambar 4.4 PKL Penjual Martabak	51
Gambar 4.5 PKL Penjual Pecel Lele.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbedaan persepsi terjadi di kalangan perencanaan dikarenakan banyaknya gejala pembangunan fisik di perkotaan yang melanggar aturan. Ini memerlukan pemikiran yang lebih jeli soal penerapan rencana tersebut. Perkembangan ruang kota yang dipengaruhi keberadaan sektor formal merupakan lingkungan usaha resmi yang dapat menampung lapangan kerja dan sektor informal merupakan lingkungan usaha tidak resmi, lapangan pekerjaan yang diciptakan dan di usahakan sendiri oleh pencari kerja. Pada waktu tertentu seringkali mengalami titik permasalahan sebagai akibat adanya kebutuhan ruang dalam menampung aktivitas. Permasalahan yang berupa ketidakteraturan masyarakat dalam menggunakan ruang sering menjadi masalah dan sering dihadapi oleh pemerintahan Kota Sungai Penuh.

Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang di kawasan perkotaan merupakan salah satu persoalan yang paling sering terjadi di wilayah perkotaan, apalagi kota besar harus berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang terus bertambah dan menumpuk. Sementara di sisi lain kemampuan dan sumber daya tampung kota tidak memadai, seperti meningkatnya angka pengangguran, semakin maraknya kriminalitas, tidak memadai sarana pelayanan publik di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya.

Kota Sungai Penuh merupakan kota perlintasan yang letaknya strategis dan selalu disinggahi dan berada diantara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Hal ini membuat Kota Sungai Penuh memiliki potensi yang cukup besar bagi tumbuh kembangnya PKL. Selain itu, PKL di kota ini mendapat respon positif dari pemerintah daerah setempat. Terbukti dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Sethurama (dalam Auliya 2011:32) seorang Pejabat International Labour Organization (ILO), Pedagang Kaki Lima dipandang sebagai sektor yang mudah dimasuki oleh pendatang baru, menggunakan sumber-sumber ekonomi dalam negeri, dimiliki oleh keluarga berskala kecil, menggunakan teknologi padat karya, keterampilan yang dibutuhkan diperoleh diluar bangku sekolah, tidak dapat diatur oleh pemerintah dan bergerak dalam pasar persaingan penuh (Hadji Ali, dalam Korompis, 2006). Kegiatan ekonomi di kota dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu: 1) Sektor Formal (perusahaan) yang bentuknya terorganisasi cara kerjanya teratur pembiayaannya dari sumber resmi, menggunakan buruh dan upah dan sebagainya. 2) Sektor Informal yang bentuknya tidak terorganisasi (kebanyakan usaha sendiri), cara kerja tidak teratur, biaya dari diri sendiri atau sumber tidak resmi, dikerjakan oleh anggota keluarga. Kelompok sektor informal ini sering juga disebut Pedagang Kaki Lima, (Robi, 2014).

PKL seringkali menjadi penyebab kesemrautan di beberapa tempat atau kota. Salah satu penyebab penataan kota adalah banyaknya PKL yang

berkelirisan di sudut-sudut kota membuat kota menjadi kurang tertata dengan rapi. Para pekerja ini sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan di daerah perkotaan dan kasus ini juga dapat kita jumpai pada Kota Sungai Penuh Provinsi Jambi.

Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kerinci dan pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 8 November 2008, yang terdiri dari 5 kecamatan, 4 kelurahan dan 65 desa yang beribukota di Sungai Penuh. Sebagai kota yang baru dibentuk seharusnya ditata dengan baik. Namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa masalah, salah satunya permasalahan Pedagang Kaki Lima. Bentuk aktivitasnya mulai dari pedagang asongan, warung makan pinggir jalan, warung jajanan, pedagang buah, dan lain-lain. Umumnya jasa usaha ini ditekuni oleh mereka yang tidak memiliki modal usaha yang cukup bahkan sama sekali tidak memiliki modal usaha kecuali tenaga dan tingkat keterampilan yang pas-pasan. Mereka berdagang hampir sepanjang hari dan malam hari.

Sektor informal khususnya PKL memang dipilih bagi sebagian orang sebagai salah satu solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi namun PKL ini juga menyebabkan terjadinya berbagai persoalan, diantaranya adalah permasalahan ketidakefisienan yang dirasakan oleh masyarakat dimana badan jalan terpakai untuk mengelola dagangan para pedagang kaki lima (PKL) sehingga mengganggu para pejalan kaki.

Dalam perkembangannya, Kota Sungai Penuh juga mengalami masalah dengan menjamurnya PKL dan mengalami pula penertiban dan penggusuran PKL terutama dikawasan-kawasan fungsional. PKL yang ada di Kota Sungai Penuh saat ini berkembang dengan pesat menempati sepanjang trotoar jalan, sehingga pedagang kaki lima tersebut berderet-deret menutupi gedung-gedung yang terdapat dikawasan itu. Penyebab PKL di Kota Sungai Penuh disebabkan tata kelola ruang yang tidak teratur dan terpusat sehingga aktivitas manusia dan barang hanya berada dalam satu titik wilayah. Kota Sungai Penuh pada masa lalu memang mempunyai tata kelola ruang yang sangat buruk, dimana semua PKL diperbolehkan berada di pusat Kota Sungai Penuh. Untuk mengatasi masalah tersebut kemudian diambil suatu tindakan penertiban dan penggusuran, dimana pihak pemerintah memberikan sebuah gedung digunakan untuk menampung PKL tersebut. Namun kenyataannya masih terdapat para PKL yang beraktivitas di tempat semula di pinggir jalan dan terminal.

Dari pengamatan awal tentang Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sungai Penuh, terdapat banyak permasalahan atau fenomena yang terjadi seperti menyebabkan kemacetan di sepanjang hari yang menghambat para pengguna jalan yang melewati jalan tersebut, penyalahgunaan ruang publik dengan menggunakan trotoar dan area parkir sebagai tempat usaha, lingkungan menjadi kumuh dikarenakan kurangnya kesadaran para PKL ini dalam menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya.

Alasan peneliti memilih Kota Sungai Penuh, dikarenakan daerah tersebut terdapat banyaknya PKL yang tidak teratur, dengan menggunakan

trotoar sebagai tempat berjualan. Hal ini tentu dilarang karena menyalahgunakan tempat publik yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki. Ruang publik yang digunakan sebagai tempat dagang ini ditempati oleh bermacam-macam pedagang yang menjual berbagai jenis dagangan, baik pedangan asongan maupun pedagang dengan menggunakan gerobak. Semua pedagang menjadikan trotoar sebagai tempat untuk menggelar dagangannya.

Peneliti memfokuskan kepada para PKL yang berada di sepanjang jalan di jalan Kota Sungai Penuh yang menggunakan sebagai badan jalan/trotoar sebagai lokasi berdagang. Fenomena pedagang kaki lima sampai sekarang belum ditemui solusi yang tepat bagaimana mengelola hal tersebut untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan tidak lagi menjadi beban perkotaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka skripsi ini berjudul ***“Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima”***

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tertata dan berdagang tidak pada tempatnya yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh.
2. Banyak pedagang kaki lima di Kota Sungai Penuh yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan merugikan banyak pihak.

3. Banyak pedagang kaki lima yang tidak memiliki izin usaha menjadi kendala dan menghambat pelaksanaan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sungai Penuh.

C. Batasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang akan diteliti sehingga maksud dan tujuannya tercapai serta menyimpang, maka perlu adanya batasan masalah. Penelitian ini dibatasi pada Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh?
2. Faktor-faktor penghambat apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Kota Sungai Penuh tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Mengetahui Pelaksanaan Perda Kota Sungai Penuh Nomor 2 tahun 2015 Pedagang Kaki Lima Kota Sungai Penuh, serta dapat memberikan masukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

2. Manfaat teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan atau pengayaan teori dalam bidang Kebijakan Publik, dan Administrasi Pertanahan dan Lingkungan Hidup.